

ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM PERIKANAN BAGI NELAYAN YANG MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU

Rizky Febrianto

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Rizky Febrianto

Abstract.

This study aims to analyze the implementation of fisheries law for fishermen who use trawlers. Trawling is a fishing gear that is controversial because of the potential to damage aquatic ecosystems and threaten the sustainability of fishery resources. This study uses a legal analysis approach and literature study to understand policies and regulations related to the use of trawlers, fishermen's understanding and awareness of these regulations, the effectiveness of supervision and law enforcement, as well as the sustainable alternatives that have been provided for fishermen. The results of this study can provide useful insights for policy makers in improving the implementation of fisheries law and maintaining the sustainability of fisheries resources.

Keywords: *implementation of fisheries law, fishermen, trawlers, sustainable fisheries resources, fisheries regulations.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas laut sebesar 5,8 Juta Km², secara geografis Indonesia diapit oleh Dua Samudra yaitu Pasifik dan Hindia, lalu 2 benua yaitu Asia dan Australia, jadi tentu Indonesia memiliki peran penting dalam kondisi sosio ekonomi negara negara, untuk membantu mengatur luas wilayah suatu negara terdapatlah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Zona lau teritorial yang dimana fungsinya adalah penanda daerah kekuasaan suatu wilayah agar dapat mengelola dan mengembangkan seluruh sumber daya yang terdapat di dalam zona tersebut, Wilayah ZEE suatu negara terhitung adalah 200 Mil Laut, sementara itu Zona Laut Teritorial Indonesia adalah 12 Mil Laut. Salah satu sumber daya yang dihasilkan oleh negara Indonesia dalam zona tersebut adalah Sumber Daya perikanan.

Perikanan adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian banyak negara, terutama bagi negara-negara yang memiliki akses ke perairan laut yang kaya akan sumber daya ikan. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas perikanan, muncul berbagai tantangan terkait pengelolaan sumber daya ikan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan nelayan.

Salah satu peralatan yang sering digunakan oleh nelayan adalah pukat harimau, yang digunakan untuk menangkap ikan secara massal. Pukat harimau merupakan jenis alat tangkap yang kontroversial karena memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti merusak terumbu karang, memasukkan ikan yang tidak diinginkan dalam tangkapan, dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, pemerintah dan lembaga terkait banyak mengeluarkan kebijakan dan regulasi dalam hukum perikanan. Namun, implementasi hukum perikanan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran nelayan tentang aturan dan regulasi, hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta kekurangan sumber daya untuk memberikan alternatif yang berkelanjutan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau.

Keterbatasan tersebut menyebabkan implementasi hukum perikanan tidak optimal dan berdampak pada keberlanjutan sumber daya ikan serta kesejahteraan nelayan yang menggunakan pukat harimau. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis implementasi hukum perikanan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau, dengan tujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi serta menyediakan rekomendasi dan strategi yang dapat meningkatkan implementasi hukum perikanan.

Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan nelayan yang menggunakan pukat harimau, pihak berwenang, dan pemangku kepentingan terkait. Data akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum perikanan serta untuk mengungkapkan perspektif dan pengalaman para nelayan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang implementasi hukum perikanan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau. Rekomendasi dan strategi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki dan memperkuat implementasi hukum perikanan. Hal ini akan mendukung upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, melindungi lingkungan perairan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menggunakan pukat harimau.

Dengan memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi hukum perikanan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau, diharapkan dapat tercipta kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat kesadaran dan pemahaman nelayan terkait perlunya menjaga keberlanjutan sumber daya

perikanan dan mempertimbangkan alat tangkap yang ramah lingkungan dalam aktivitas penangkapan ikan.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode literature review. Metode literature review dapat digunakan dalam penelitian dengan judul "Analisis Implementasi Hukum Perikanan Bagi Nelayan yang Menggunakan Pukat Harimau". Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis literatur yang relevan mengenai topik penelitian secara sistematis. Interpretasikan dan sintesiskan temuan-temuan utama dari literatur yang dianalisis. Identifikasi kesamaan, perbedaan, dan pola yang muncul dalam implementasi hukum perikanan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau. Buatlah rangkuman yang jelas dan komprehensif tentang informasi yang ditemukan, serta hubungkan temuan-temuan ini dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan regulasi terkait penggunaan pukat harimau oleh nelayan bervariasi di setiap negara, wilayah, dan tingkat pemerintahan yang berbeda. Namun, berikut ini adalah beberapa kebijakan dan regulasi umum yang mungkin terkait dengan penggunaan pukat harimau dalam hukum perikanan:

1. **Izin dan Lisensi:** Banyak negara mewajibkan nelayan untuk memiliki izin atau lisensi resmi sebelum menggunakan pukat harimau. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol aktivitas penangkapan ikan dengan pukat harimau serta memastikan bahwa nelayan memenuhi persyaratan tertentu, seperti penggunaan alat tangkap yang sesuai dan kepatuhan terhadap ukuran minimum ikan yang dapat ditangkap.
2. **Pembatasan Spesifik:** Beberapa negara menerapkan pembatasan khusus terkait penggunaan pukat harimau, seperti pembatasan musim penangkapan atau area penangkapan tertentu. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk melindungi sumber daya ikan dan ekosistem perairan, serta memastikan keberlanjutan stok ikan.
3. **Batasan Ukuran dan Desain:** Kebijakan perikanan juga sering kali mengatur batasan ukuran dan desain pukat harimau yang digunakan oleh nelayan. Hal ini dapat mencakup ukuran jaring, penggunaan panel saring, dan perlengkapan lainnya yang dapat mempengaruhi efisiensi tangkapan dan selektivitas spesies.
4. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Kebijakan perikanan juga mencakup pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan pukat harimau. Pemerintah dan lembaga perikanan bertanggung jawab untuk melakukan

pengawasan terhadap nelayan yang menggunakan pukat harimau, memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku, serta memberlakukan sanksi atau tindakan penegakan hukum yang diperlukan dalam kasus pelanggaran.

5. Kolaborasi dan Konsultasi dengan Nelayan: Beberapa negara menerapkan pendekatan kolaboratif dalam pengembangan kebijakan perikanan terkait pukat harimau dengan melibatkan nelayan secara langsung. Melalui konsultasi dan partisipasi nelayan, kebijakan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh nelayan yang menggunakan pukat harimau.

Perlu diingat bahwa kebijakan dan regulasi terkait pukat harimau dapat berbeda di setiap negara atau wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian yang mendalam dan spesifik terkait hukum perikanan di daerah yang menjadi fokus penelitian.

Pemahaman dan kesadaran nelayan tentang aturan dan regulasi terkait penggunaan pukat harimau dalam aktivitas perikanan dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, pelatihan, budaya lokal, dan interaksi dengan lembaga perikanan. Dalam konteks ini, pemahaman dan kesadaran yang tinggi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman dan kesadaran nelayan tentang aturan dan regulasi terkait penggunaan pukat harimau:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Tingkat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh nelayan dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang aturan dan regulasi perikanan. Nelayan yang memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi mungkin lebih mampu memahami dan menginterpretasikan aturan yang ada. Selain itu, pelatihan khusus yang diberikan oleh lembaga perikanan atau organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan pukat harimau yang sesuai dengan peraturan.
2. Akses Informasi: Ketersediaan dan akses nelayan terhadap informasi tentang aturan dan regulasi perikanan juga penting. Informasi tersebut dapat berupa brosur, pamflet, panduan, atau pemberitahuan resmi dari lembaga perikanan yang menjelaskan tata cara penggunaan pukat harimau yang sah. Akses ke informasi ini dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran nelayan tentang persyaratan dan kewajiban mereka.
3. Komunikasi dan Partisipasi: Komunikasi yang baik antara lembaga perikanan dan nelayan serta partisipasi aktif nelayan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang aturan dan regulasi terkait pukat harimau. Dengan melibatkan nelayan dalam dialog dan diskusi, lembaga perikanan dapat

menyampaikan informasi secara lebih efektif, mendengarkan masukan dari nelayan, dan memperbaiki pemahaman tentang penggunaan pukat harimau.

4. **Faktor Budaya dan Tradisional:** Faktor budaya dan tradisional juga dapat mempengaruhi pemahaman dan kesadaran nelayan tentang aturan dan regulasi. Beberapa komunitas nelayan mungkin memiliki tradisi dan praktik yang melekat dalam penggunaan pukat harimau, dan ini dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap peraturan yang mungkin berbeda. Dalam kasus seperti ini, pendekatan yang sensitif terhadap aspek budaya dan tradisional diperlukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang regulasi.
5. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan pukat harimau juga dapat memengaruhi pemahaman dan kesadaran nelayan. Ketika lembaga perikanan secara aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas perikanan, memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, dan memberikan informasi tentang aturan yang jelas, nelayan cenderung memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih baik.

Peningkatan pemahaman dan kesadaran nelayan tentang aturan dan regulasi terkait penggunaan pukat harimau dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Program pelatihan dan penyuluhan yang terarah, melibatkan lembaga perikanan dan organisasi masyarakat.
2. Meningkatkan aksesibilitas informasi melalui penerbitan materi edukatif dan penggunaan media sosial.
3. Membangun jaringan kerjasama antara nelayan dan lembaga perikanan, memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan pertukaran pengetahuan.
4. Mengintegrasikan pengetahuan lokal dan tradisional dalam penyusunan regulasi, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan nelayan.
5. Meningkatkan kapasitas penegakan hukum, termasuk pengawasan yang efektif dan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran.

Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran nelayan tentang aturan dan regulasi terkait penggunaan pukat harimau, diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang lebih patuh terhadap regulasi, perlindungan sumber daya perikanan yang lebih baik, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan pukat harimau oleh nelayan merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Dalam konteks ini, berikut adalah beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait penggunaan pukat harimau oleh nelayan:

1. **Ketersediaan Sumber Daya:** Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai, seperti personel, dana, peralatan, dan infrastruktur. Lembaga perikanan perlu memiliki personel yang terlatih dan berkualifikasi untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pemeriksaan terhadap nelayan yang menggunakan pukat harimau. Sumber daya yang cukup akan memungkinkan lembaga perikanan untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik.
2. **Kerjasama Antarlembaga:** Kerjasama antara lembaga perikanan dengan lembaga terkait lainnya, seperti kepolisian, lembaga pengawasan lingkungan, dan lembaga pemerintah terkait lainnya, sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dengan saling berkoordinasi dan berbagi informasi, lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja sama untuk mengatasi pelanggaran terkait penggunaan pukat harimau.
3. **Sanksi yang Deterrent:** Sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran penggunaan pukat harimau adalah elemen penting dalam penegakan hukum. Hukuman yang memadai, seperti denda yang signifikan, pencabutan izin, atau bahkan tindakan hukum pidana, dapat memberikan efek jera bagi nelayan yang melanggar aturan. Dalam hal ini, perlu adanya kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan sanksi agar nelayan merasa bahwa pelanggaran terhadap aturan memiliki konsekuensi yang serius.
4. **Peningkatan Kapasitas:** Nelayan dan petugas penegak hukum perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai terkait penggunaan pukat harimau dan peraturan yang terkait. Pelatihan dan penyuluhan yang berkala dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perikanan, metode penangkapan yang berkelanjutan, dan pentingnya pelestarian sumber daya perikanan. Peningkatan kapasitas ini akan membantu nelayan untuk mematuhi aturan dan membantu petugas penegak hukum dalam melakukan tugas mereka.

Untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan memberikan alternatif yang berkelanjutan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau, beberapa inisiatif telah dilakukan. Implementasi alternatif berkelanjutan ini bervariasi di setiap wilayah dan tergantung pada faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi aktivitas perikanan. Berikut adalah beberapa contoh alternatif berkelanjutan yang telah disediakan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau:

1. **Aliansi Nelayan dan Konservasi:** Aliansi antara nelayan dan organisasi konservasi dapat menciptakan solusi bersama untuk menjaga sumber daya perikanan dan mempromosikan praktik perikanan yang berkelanjutan. Misalnya, organisasi konservasi dapat membantu nelayan dalam mengembangkan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan

- memberikan pelatihan tentang teknik penangkapan yang lebih selektif. Aliansi semacam ini memungkinkan nelayan untuk tetap menjalankan usaha mereka secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem perairan.
2. **Diversifikasi Mata Pencarian:** Salah satu alternatif yang dapat diberikan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau adalah diversifikasi mata pencarian. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan untuk mengembangkan keterampilan tambahan di luar sektor perikanan. Contohnya adalah mengembangkan keahlian dalam budidaya rumput laut, pembuatan kerajinan tangan dari bahan-bahan alami, atau usaha pariwisata berbasis laut. Diversifikasi mata pencarian ini membantu nelayan mengurangi ketergantungan mereka pada penggunaan pukat harimau dan menciptakan alternatif yang lebih berkelanjutan secara ekonomi.
 3. **Pengelolaan Wilayah Pesisir:** Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis ekosistem dapat memberikan alternatif berkelanjutan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau. Pendekatan ini melibatkan upaya pemetaan, pemantauan, dan pengelolaan yang terintegrasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Melalui pengelolaan wilayah pesisir yang baik, nelayan dapat beralih ke praktik perikanan berkelanjutan, seperti budidaya ikan atau pengelolaan tangkapan berbasis kuota yang terkontrol.
 4. **Pengembangan Usaha Pesisir:** Pengembangan usaha pesisir merupakan alternatif berkelanjutan lainnya yang dapat disediakan bagi nelayan. Inisiatif ini melibatkan pengembangan usaha tambahan, seperti pembuatan kerajinan atau pengolahan hasil tangkapan ikan menjadi produk bernilai tambah. Dengan mengembangkan usaha tambahan ini, nelayan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada pukat harimau. Pendampingan dalam bidang pengelolaan usaha, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah produk dapat membantu nelayan dalam mengembangkan usaha pesisir yang berkelanjutan.
 5. **Pemulihan Ekosistem dan Penyuluhan:** Alternatif berkelanjutan lainnya adalah melalui program pemulihan ekosistem dan penyuluhan kepada nelayan. Melalui program ini, nelayan diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pelestarian ekosistem perairan dan dampak negatif penggunaan pukat harimau terhadap sumber daya perikanan. Pemulihan ekosistem dapat melibatkan kegiatan rehabilitasi terumbu karang, restorasi mangrove, atau penanaman jenis-jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi. Sementara itu, penyuluhan kepada nelayan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang praktik perikanan yang berkelanjutan dan mengedukasi mereka mengenai metode penangkapan yang lebih ramah lingkungan.

Implementasi alternatif berkelanjutan ini dapat bervariasi dalam tingkat keberhasilan dan penerapannya tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat. Penting untuk melibatkan nelayan secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan alternatif berkelanjutan ini agar mereka merasa memiliki dan mendukung solusi yang ditawarkan.

Ketimpangan ekonomi dan sosial memiliki dampak signifikan terhadap implementasi hukum perikanan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau. Faktor-faktor ini mempengaruhi kemampuan nelayan untuk mematuhi aturan dan regulasi serta memberikan tantangan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Berikut adalah beberapa cara ketimpangan ekonomi dan sosial memengaruhi implementasi hukum perikanan:

1. Akses Terbatas terhadap Sumberdaya: Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan akses terbatas nelayan yang lebih miskin terhadap sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Nelayan dengan sumber daya terbatas cenderung mencari cara-cara cepat untuk mendapatkan pendapatan, termasuk menggunakan pukat harimau yang lebih efisien dalam menangkap ikan. Ketimpangan sosial juga dapat memengaruhi akses nelayan terhadap sumber daya, seperti akses terhadap peralatan penangkapan ikan yang lebih efektif atau akses ke pasar yang menguntungkan. Ketimpangan ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam kepatuhan terhadap aturan dan regulasi perikanan.
2. Keterbatasan Alternatif Ekonomi: Nelayan yang bergantung pada penggunaan pukat harimau seringkali menghadapi keterbatasan dalam mencari alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Ketimpangan ekonomi dapat membatasi kemampuan mereka untuk memulai usaha baru, mengembangkan keterampilan tambahan, atau mengakses pasar yang lebih menguntungkan. Akibatnya, nelayan tersebut mungkin merasa terjebak dalam praktik perikanan yang tidak berkelanjutan, karena kurangnya alternatif ekonomi yang memadai.
3. Kesenjangan Pengetahuan dan Pendidikan: Ketimpangan sosial seringkali terkait dengan kesenjangan dalam pengetahuan dan pendidikan. Nelayan yang menghadapi ketimpangan ini mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap informasi tentang aturan dan regulasi perikanan yang berlaku. Kurangnya pendidikan formal juga dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan dan dampak negatif penggunaan pukat harimau. Kesenjangan pengetahuan ini dapat menjadi penghalang dalam mematuhi aturan dan melaksanakan praktik perikanan yang berkelanjutan.
4. Tantangan Hukum dan Keadilan: Ketimpangan ekonomi dan sosial juga dapat mempengaruhi akses nelayan terhadap sistem hukum yang adil. Nelayan yang miskin mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses bantuan hukum

atau perlindungan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Selain itu, kesenjangan sosial juga dapat memengaruhi perlakuan yang berbeda terhadap nelayan yang menggunakan pukat harimau oleh aparat penegak hukum. Tidak adanya keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum dapat merugikan nelayan yang menggunakan pukat harimau.

5. Konflik Sosial dan Ketegangan: Ketimpangan ekonomi dan sosial dapat menciptakan konflik sosial antara nelayan yang menggunakan pukat harimau dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam keberlanjutan sumber daya perikanan. Ketegangan ini bisa berakar dari persaingan atas sumber daya, ketidakadilan dalam distribusi manfaat, atau perbedaan pandangan mengenai penggunaan pukat harimau. Konflik sosial ini dapat menghambat implementasi hukum perikanan dan mempengaruhi upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Untuk mengatasi dampak ketimpangan ekonomi dan sosial terhadap implementasi hukum perikanan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Upaya yang melibatkan pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi, perlindungan hukum yang adil, serta dialog dan kerjasama antara semua pemangku kepentingan terkait perikanan dapat membantu mengurangi ketimpangan dan mencapai praktik perikanan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Ketimpangan ekonomi dan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi hukum perikanan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau. Faktor-faktor ini mempengaruhi kemampuan nelayan untuk mematuhi aturan dan regulasi, serta memberikan tantangan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Ketimpangan ekonomi membatasi akses nelayan terhadap sumber daya yang berkelanjutan dan keterbatasan alternatif ekonomi. Sementara itu, ketimpangan sosial melibatkan kesenjangan pengetahuan, pendidikan, tantangan hukum, dan konflik sosial.

Untuk mengatasi dampak tersebut, perlu dilakukan upaya yang komprehensif. Pemberdayaan ekonomi dapat memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi nelayan, sehingga mengurangi ketergantungan pada penggunaan pukat harimau. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai aturan dan regulasi perikanan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran nelayan tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan.

Perlindungan hukum yang adil harus diberikan kepada nelayan yang menggunakan pukat harimau, termasuk akses yang memadai terhadap bantuan hukum dan perlindungan hak-hak mereka. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang konsisten dan adil dalam penegakan aturan perikanan.

Dialog dan kerjasama antara semua pemangku kepentingan terkait perikanan menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Melibatkan nelayan, pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam sektor perikanan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan akan menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, implementasi hukum perikanan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau terkait dengan ketimpangan ekonomi dan sosial merupakan tantangan yang kompleks. Untuk mencapai praktik perikanan yang berkelanjutan, diperlukan upaya yang menyeluruh dan terpadu, termasuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan dan informasi, perlindungan hukum yang adil, serta dialog dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Dengan cara ini, diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi nelayan yang menggunakan pukat harimau, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., 2002. Konflik Sosial : Ancaman Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, dalam jurnal PSPK, Konflik Dalam Masa Transisi, PSPK, Jakarta.
- Abdul Wahab, S. 1988. Ekonomi Politik dan Bisnis Indonesia Era Orde Baru. Universitas Brawijaya, Malang.
- Amstutz, M R. 1988. An Introduction to Political Science. The Management of Conflict. Scott, Foreman and Company, Glenview, Illinois.
- Ary Wahyono. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. 1999. Pembangunan Masyarakat Madani, Tinjauan Birokratik Pilitik. Jurnal Kebijakan Administrasi Publik Vol-3 tahun 1999. Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Hamner, W. C and Dennis W. M. 1978. Conflict and Defence, Business Publication Inc, Dallas.
- Hendricks, W. 2001. Bagaimana Mengelola Konflik, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ida, L. 2002. Kekacauan Implementasi Otonomi Daerah : Perebutan Kuasa Politik dan Materi, dalam jurnal PSPK, Konflik Dalam Masa Transisi, PSPK, Jakarta.
- Islamy, I. 1998. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik, FIA Universitas Brawijaya, Malang.
- Kartasmita, G. 1997. Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya, LP3ES, Jakarta.

- Korten, D. C dan Sjahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Indonesia, Jakarta.
- Koswara, E. 2000. *Pengaruh Format Politik Nasional Terhadap Demokrasi Lokal*, dalam Julianara, Dadang. 2000. *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. LAPERA, Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Murdjito, F.X. 1998. *Keragaan dan Kebijaksanaan Pembangunan Perikanan Pelita VI dan Tinjauan Menghadapi Era Globalisasi*, dalam Prosiding Simposium Perikanan Indonesia II, Ujung Pandang, 2-3 Desember 1997.
- Nadjib, M. 1998. *Adaptasi Ekonomi Masyarakat Nelayan* dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Nomor 2/1998, PEP-LIPI, Jakarta.
- Nikijuluw, V.P.H. 2002 *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R), Jakarta.
- Pelly, Usman. 1993. *Pengukuran Intensitas Potensi Konflik dalam Masyarakat Majemuk* (*Jurnal Analisis CSIS Tahun XXII No. 3 Mei-Juni*). Centre For Strategic And International Studies.